

# DEMOKRASI UNTUK INDONESIA

## Grup Governance Science

- |                             |                 |
|-----------------------------|-----------------|
| 1. AGUNG KURNIAWAN          | 201020050311043 |
| 2. NOVI KARINA SARI         | 201010050311027 |
| 3. WINDA PIPIT ALFIANA DEWI | 201010050311046 |
| 4. RIA TALPIAH LATUCONSINA  | 201010050311075 |



Menurut *International Commission for Jurist*

Demokrasi adalah suatu bentuk pemerintahan dimana hak untuk membuat keputusan-keputusan politik di selenggarakan oleh warga melalui wakil-wakil yang di pilih oleh mereka dan bertanggung jawab kepada mereka melalui suatu proses pemilihan yang bebas.

Menurut C.F. Strong

Suatu sistem pemerintahan dalam mana mayoritas anggota dewasa dari masyarakat politik ikut serta dalam atas dasar sistem perwakilan yang menjamin bahwa pemerintah akhirnya mempertanggung jawabkan tindakan-tindakan kepada mayoritas itu.

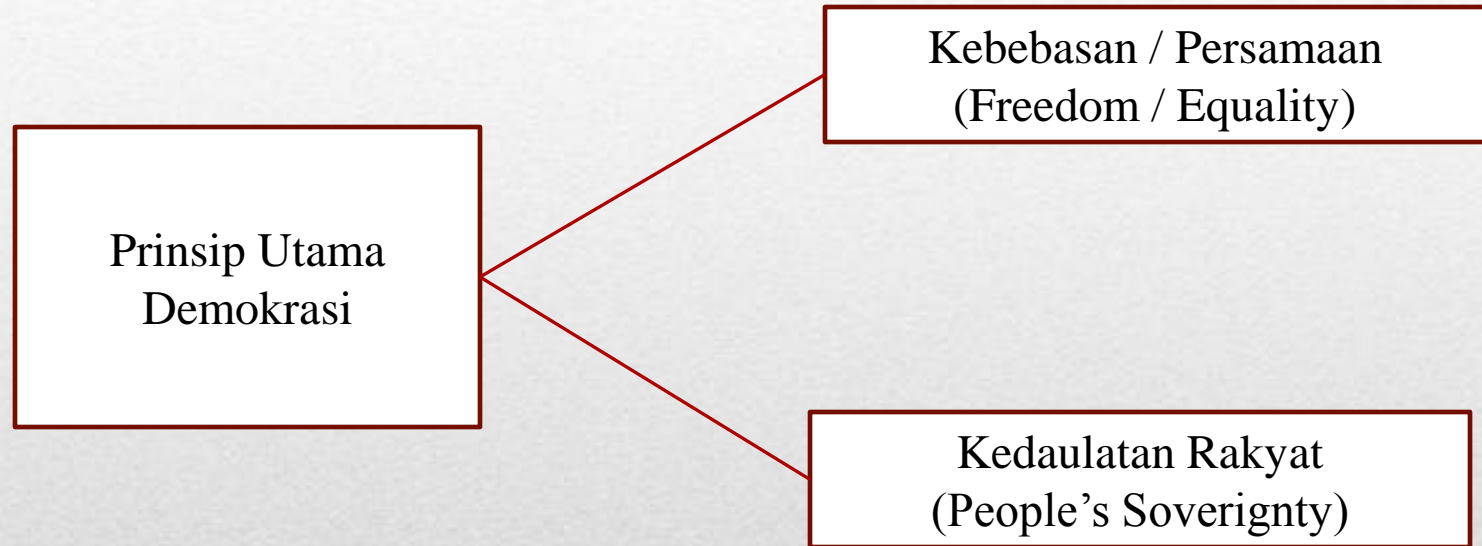
# **Pengertian Demokrasi**

---

C.FStrongSuatu sistem pemerintahan dalam mana mayoritas anggota dewasa dari masyarakat politikikut serta dalam atas dasar sistem perwakilan yangmenjamin bahwa pemerintah akhirnya mempertanggung jawabkan tindakan-tindakan kepada mayoritas itu.

Samuel Huntington Sistem politik sebagai demokratis sejauh para pembuat keputusan kolektif yang paling kuat dalam sistem itu di pilih melalui pemilihan umum yang adil, jujur, dan berkala dan didalam sistem itu para calon bebas bersaing untuk memperoleh suara dan hampir semua penduduk dewasa berhak memberikan suara.

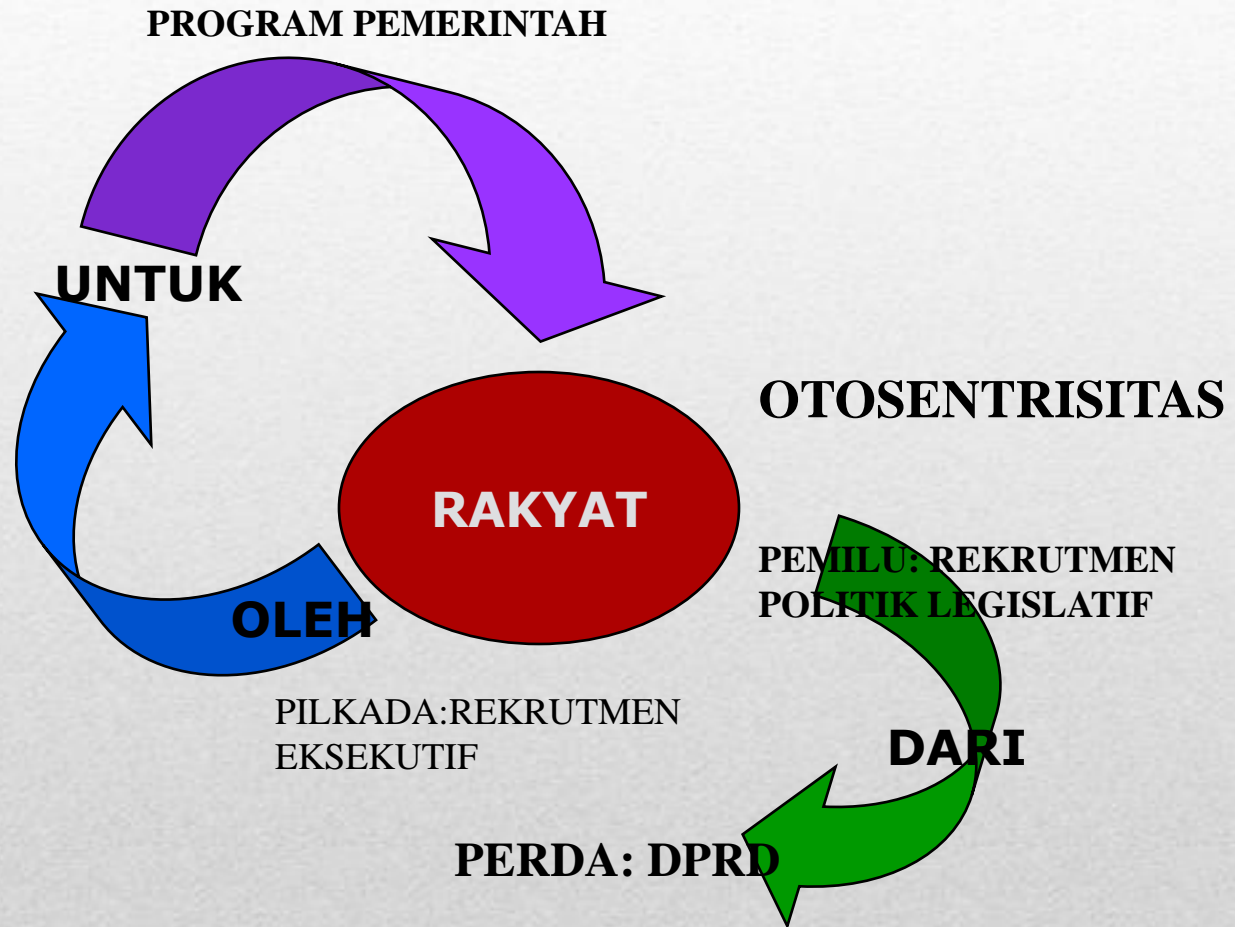
Ada satu pengertian mengenai demokrasi yang di anggap paling populer diantara pengertian yang ada. Pengertian tersebut dikemukakan pada tahun 1863 oleh Abraham Lincoln yang mengatakan demokrasi adalah pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat (*government of the people, by the people, and for the people*).



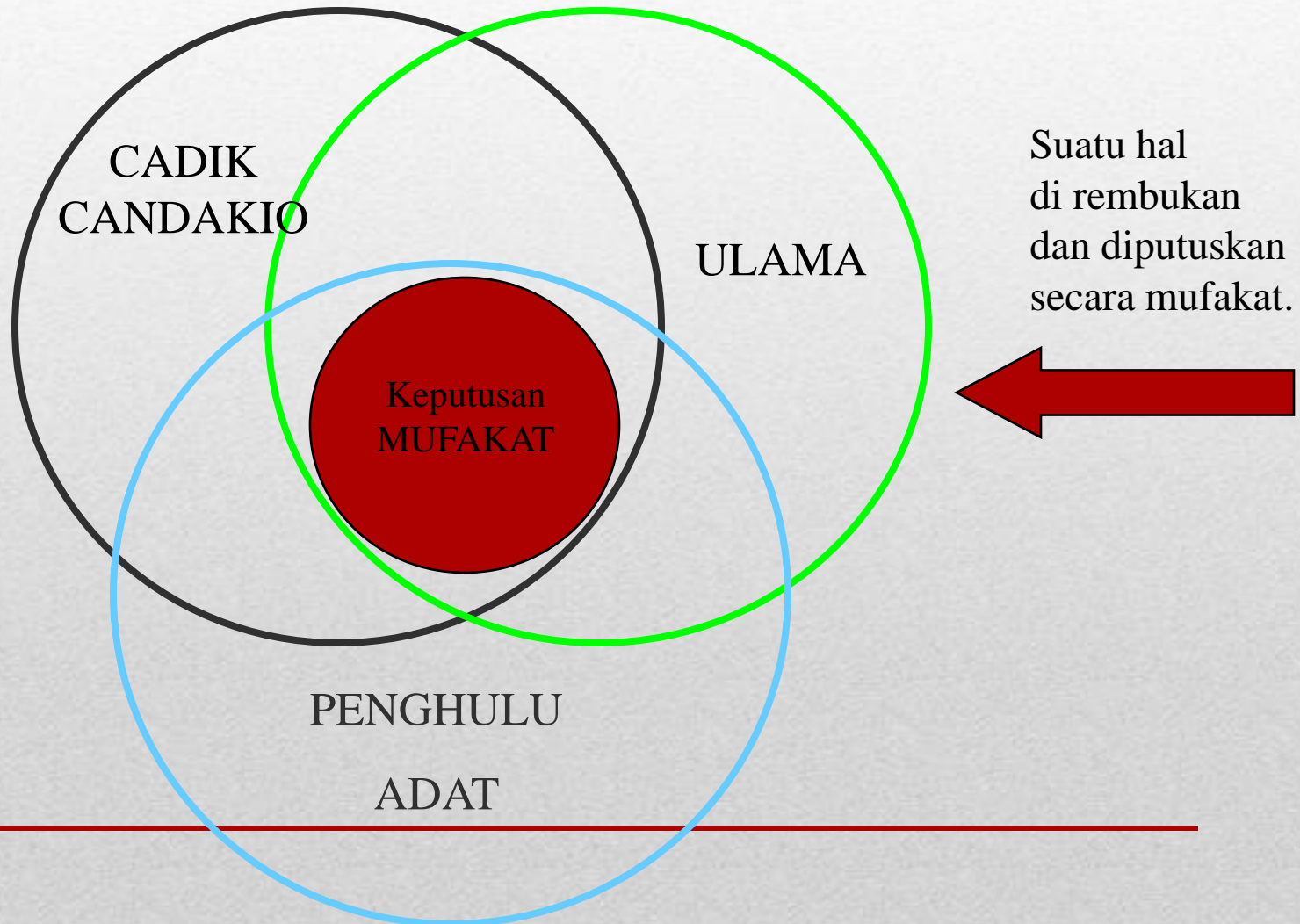
Maswadi Rauf , 1997

---

# DEMOKRASI



# KONSEP DAN PRAKSIS DEMOKRASI DALAM MASYARAKAT MINANGKABAU



# Lanjutan

Dalam masyarakat Minang, prinsip pengambilan keputusan dikenal dengan sebutan, *bulek lah bulieh digolongkan, picak lah bulieh dilayangkan*.

artinya melaksanakan kesepakatan segera dengan dukungan semua pihak.

- Masyarakat minang tidak mengenal satu penguasa atau raja yang berkuasa mutlak, melainkan bersifat kolegial dalam suatu pemerintahan nagari. Prinsip mereka *mamak alim mamak di sambah, mamak lalim mamak di sanggah*. Artinya boleh melawan pemimpin yang zalim. Masyarakat minang hanya menghargai pemimpin yang memberi manfaat kepada rakyatnya.



# Demokrasi sebagai Sistem Politik

Demokrasi Sebagai Sistem Politik Beberapa ahli telah mendefinisikan demokrasi sebagai sistem politik :

Hendry B. Mayor

menyatakan demokrasi sebagai sistem politik merupakan suatu sistem yang menunjukkan bahwa kebijakan umum ditentukan atas dasar mayoritas oleh wakil-wakil yang diawasi secara efektif oleh rakyat dalam pemilihan yang berkala yang didasarkan atas prinsip kesamaan politik dan diselenggarakan dalam suasana terjaminnya kebebasan politik.

Samuel Huntington, menyatakan bahwa sistem politik sebagai demokratis sejauh para pembuat keputusan kolektif yang paling kuat dalam sistem itu dipilih melalui pemilihan yang adil, jujur, dan berkala dan di dalam sistem itu para calon bebas bersaing untuk memperoleh suara dan hampir semua penduduk desa berhak memberikan suara. Sistem Politik dewasa ini di bedakan menjadi dua sistem politik demokrasi dan sistem politik nondemokrasi (Huntington, 2001).

# Demokrasi untuk Indonesia

- Demokrasi, seperti halnya konsep-konsep politik terapan lainnya seperti kekuasaan, negara dan birokrasi, merupakan sebuah istilah yang paling dekat dengan pemahaman masyarakat umum, tetapi sebenarnya mengandung keterbatasan-keterbatasan tertentu.
- Keterbatasan pertama, karena sifat keumumannya, demokrasi yang merupakan konsep politik Barat sudah dianggap pasti sebagai cara terbaik untuk membangun kehidupan suatu bangsa dewasa ini.

- Fenomena ini terjadi terutama karena pengaruh negara-negara barat, khususnya melalui program bantuan ke negara-negara non-Barat , menunjukkan kecenderungan ke arah proses demokratisasi .
- Samuel P.Huntington menyebut kurun waktu ini sebagai gelombang ketiga dalam proses demokratisasi negara-negara di dunia.

Huntington mengidentifikasi adanya tiga tipe proses demokratisasi-liberalisasi tersebut, yaitu:

- (1) transformation,
- (2) replacement, dan
- (3) transplacement

Didalam tipe transformasi, inisiatif proses demokratisasi dan liberalisasi justru dilaksanakan oleh atau dari dalam rezim otoriter itu sendiri atau semula otoriter. Rezim ini telah berusaha menggantikan sistem kekuasaannya dengan sistem yang lebih demokratik.

## **Tipe demokratisasi-liberalisasi**

Konflik di Indonesia dewasa ini sebenarnya bersumber utama dari dua hal, menurut Huntington :

- 1. Sebagai efek sampingan dari proses demokratisasi, terutama ketika proses tersebut terperangkap didalam bentuk *replacement* yang mana tidak mau dilalui dengan berbagai konflik. Merupakan “efek domino”, dari pola konflik peradaban dunia –sebagai ganti dari konflik ideologi– pasca perang dingin.
- 2. Pola konflik tersebut berbentuk multi dimensional, dan memiliki ciri implosif yang mempunyai daya retak sangat tinggi, sehingga masyarakat di mana konflik itu terjadi akan teriris-iris kedalam serpihan-serpihan kecil.

Pola konflik di Indonesia saat ini dapat diskemakan sbb:

- (a) derivat dari konflik peradaban Barat versus non-Barat misalnya konflik yang diwarnai pertentangan agama Keristen dengan Islam di Maluku.
  
- (b) derivat konflik Barat-non Barat melawan non Barat dikombinasi dengan etnis, misalnya kasus konflik di Kalimantan Barat antara suku Dayak (keristen) dengan Malayu (elemen Islam tertentu) melawan suku Madura (elemen Islam yang lain).

*LANJUTAN\_.....*

- (c) konflik etnis dan regionalisme, misalnya kasus Irian Barat dan Aceh.
  
- (d) konflik kepentingan politik, misalnya kericuhan di sampang yang melibatkan sebagian besar sesama warga Nahdlatul Ulama' (NU) di sampang.



- Indonesia sendiri mengalami pembaruan politik mendasar sejak tahun 1998 , menandai berakhirnya dua bentuk sistem otoriter sebelumnya : orde lama dan orde baru. Meskipun secara formal-konstitusional, berdasarkan UUD 45, kehidupan politik Indonesia sudah sejak zaman kemerdekaan menganut asas kedaulatan rakyat, tetapi interupsi dua sistem otoriter tersebut, yang secara keseluruhan berlangsung hampir empat dekade, telah menguburkan prinsip kedaulatan rakyat secara substantif.

- Berakhirnya rezim Orde Baru tahun 1998 dan berawalnya apa yang disebut era reformasi telah menandai semangat baru dalam tekad yang kuat untuk mewujudkan kehidupan politik yang benar-benar demokratis secara reformasi di bidang-bidang lain.

- Ini berarti, demokrasi bagi bangsa Indonesia bukan lagi menjadi konsep yang perlu di kaji secara ilmiah di lingkungan terbatas , tetapi sudah menjadi kebutuhan praktis dalam kehidupan berbangsa dan bernegara ke depan.
- Kecenderungan, proses demokratisasi di Indonesia sampai sekarang ini masih berkuat dengan pengaturan-pengaturan formal-prosedural tidak menghilangkan fakta, demokrasi sudah menjadi fenomena yang mewarnai kehidupan masyarakat sehari-hari.

# Jalan Keluar : Demokrasi Untuk Indonesia

Bung Hatta mengemukakannya sebagai berikut :

“ berdasarkan kepada pengalaman yang diperoleh di benua Barat, dan bersendi pula kepada susunan masyarakat desa Indonesia asli, kita dapat mengemukakan Kedaulatan Rakyat yang lebih sempurna sebagai dasar pemerintahan Republik Indonesia. Kedaulatan rakyat kita meliputi kedua-duanya ; demokrasi politik dan demokrasi ekonomi. Dengan mudah kita dapat mengemukakannya, oleh karena itu, masyarakat kita tidak mengandung penyakit individualisme. Pada dasarnya masyarakat Indonesia masih bersendi kepada kolektivisme. ”

# Masyarakat asli Indonesia

Bung Hatta mendasarkan pemikirannya tentang demokrasi untuk Indonesia pada kelemahan-kelemahan yang terkandung dalam demokrasi barat serta kesesuaian dengan sifat masyarakat Indonesia.


Konsep-konsep yang melekat pada masyarakat asli Indonesia ialah , desa demokrasi , rapat, kolektivisme, musyawarah , mufakat, tolong menolong dan banyak lagi.

- Bung Hatta pun di jelaskan dlm buku ini, mengacu pada ciri atau sifat kehidupan dalam masyarakat asli Indonesia yang demokratis atau “desa demokrasi” , bukan pada masyarakat asli itu sendiri sebagai bentuk kehidupan faktual di masa lampau.

- Sifat demokratis masyarakat asli Indonesia ini besumber dari semangat kebersamaan atau kolektivitas yang hidup dalam hati sanubari setiap anggota masyarakat asli ini, di mana kehidupan seseorang di anggap sebagai bagian dari kehidupan masyarakat secara keseluruhan.

- Kolektivisme ini mewujudkan dalam sikap saling tolong-menolong sesama anggota masyarakat desa dalam menjalani kehidupan mereka sehari-hari, sebagai bentuk “solidaritas khas masyarakat agraris tradisional”.





Sebab, sebagai paham, demokrasi bersumber pada prinsip kebebasan individual yang tumbuh dan hidup subur di negara-negara Barat sejak abad ke 17 yang lalu, sebagaimana sudah disinggung sebelumnya, memiliki keterbatasan-keterbatasan tertentu , antara lain sebagaimana yang di catat Carol C.Gould.



Demokrasi yang bersumber dari pemikiran politik Barat ini perlu di kaji secara ilmiah. Khususnya bila kita ingin menikmati kegunaan praktisnya bagi kehidupan politik Indonesia.

- Ini berarti , demokrasi belum tentu efektif apabila di terapkan untuk bangsa-bangsa non-Barat seperti Indonesia yang pada umumnya masih berdasarkan pada prinsip kekeluargaan atau kebersamaan.

- Dengan kata lain, komunitas ilmiah di Indonesia perlu lebih meminati bidang kajian pemikiran politik, khususnya dengan mengkaji kekuatan dankelemahan serta keberlakuan konsep-konsep politik yang berasal dari pemikiran Barat, dan sebaliknya, mencari alternatifnya dari khazanah budaya sendiri.

- Menghidupkan nilai di masyarakat adalah bentuk partisipasi demokratisasi. Jika nilai seperti keadilan, toleransi, kebebasan dan kesetaraan hidup dan menjadi karakter dalam keseharian, maka demokrasi tumbuh dengan baik. Tanah subur dapat menumbuhkan pohon dengan sempurna. Semakin subur nilai-nilai di masyarakat, semakin bangunan demokrasi kokoh.

# Pendidikan Demokrasi

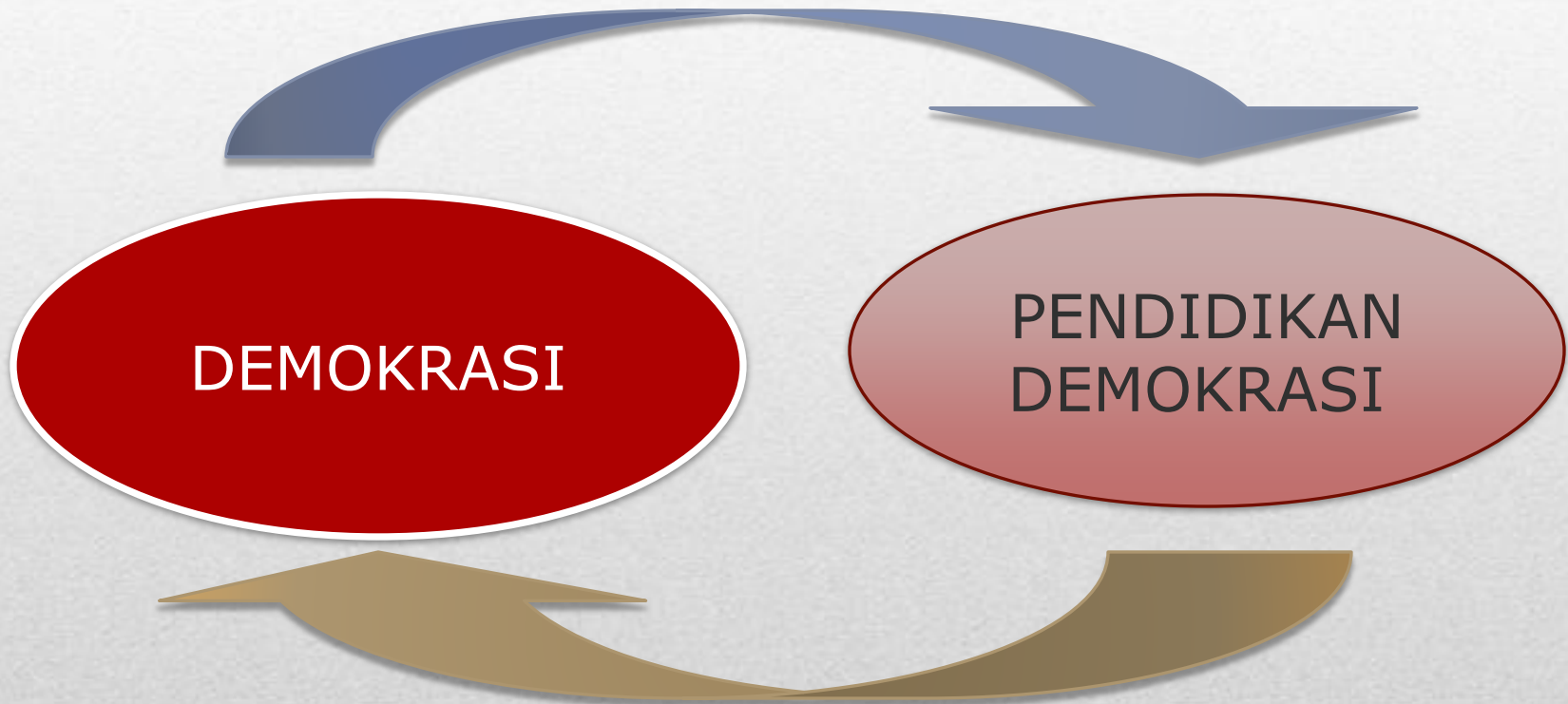
Pendidikan Demokrasi dalam praktek nyata telah di kembangkan disekolah-sekolah.

Kurikulum pendidikan demokrasi menyangkut dua hal yaitu : penataan dan isi materi. Penataa menyangkut pemuatan pendidikan demokrasi dalam suatu kegiatan kurikuler dan isi materi berkenaan dengan kajian atau bahan apa saja yang layak dari pendidikan demokrasi

Pendidikan Demokrasi dimasukan dalam Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan

---

**DEMOCRACY IS NOT INHERITED,  
(DEMOKRASI TIDAKLAH DIWARISKAN  
DENGAN SENDIRINYA)**



**BUT IT IS LEARNED  
(TETAPI DITANGKAP DAN DICERNA  
MELALUI PROSES BELAJAR)**

---